

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil, makmur, dan merata. Banyak upaya pembangunan nasional yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan dalam pembangunan di setiap daerah, terutama daerah yang masih mengalami kekurangan dalam hal pendapatan. Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan bertanggung jawab kepada masyarakat secara transparan, efisien, dan efektif. Hal ini sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah di tentukan.

Untuk mendukung terciptanya otonomi daerah yang efektif sehingga diterapkan mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah diatur dalam UU No 33 Tahun 2004. Undang-undang tersebut mengatur tiga bentuk desentralisasi fiskal, yaitu Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Melalui pelaksanaan desentralisasi fiskal ini, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan pemasukan keuangan daerah mereka, maka mereka memiliki kemampuan mandiri dalam mengelola keuangan sendiri dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Kemandirian tersebut

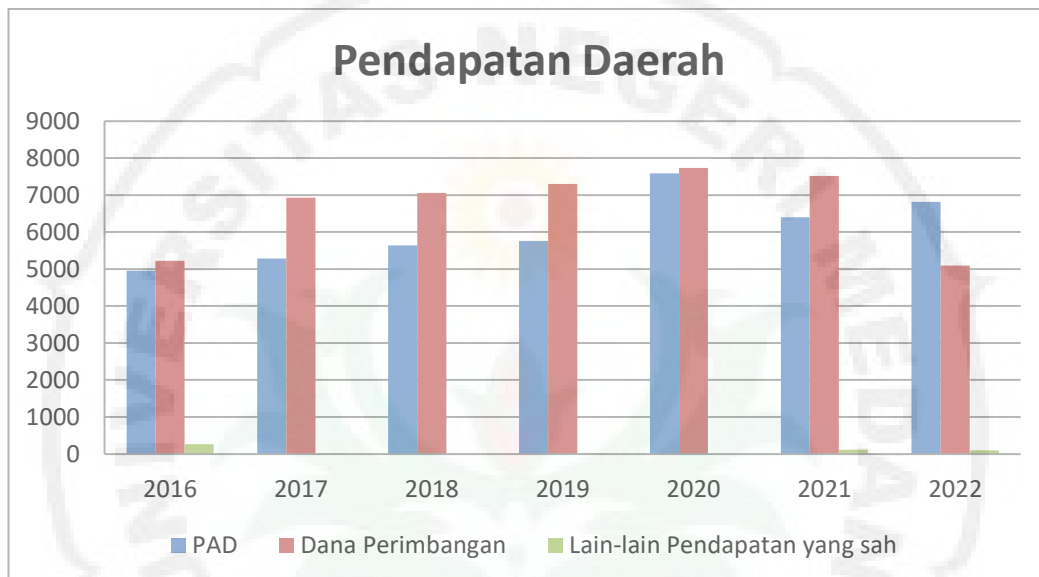
bisa berhasil apabila memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi, Pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah (PAD) lainnya yang sah.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan yang diterima daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah berdasarkan perundang-undangan. PAD dianggap sebagai salah satu sumber keuangan yang bisa dipercayakan dalam mengelola otonomi daerah. Maka dari itu, pemerintah daerah harus menggali potensi daerahnya secara maksimal agar tidak mengalami masalah terutama dalam hal pembiayaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Penerimaan daerah tersebut menjadi kekuatan penuh bagi daerah tersebut untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari beberapa sumber penerimaan, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, dan laba perusahaan daerah, serta mencakup pendapatan lain di luar daerah pajak dan retribusi daerah (Handoko, 2012).

Keberhasilan suatu otonomi daerah dapat dilihat dari pendapatan daerahnya, ketika pendapatan asli suatu daerah melebihi pendapatan daerah lainnya sehingga bisa dikatakan daerah tersebut berhasil menjalankan otonomi daerah. Sebad PAD dapat dikatakan sebagai indikator untuk melihat keterikatan suatu daerah terhadap pemerintah pusat. Pada umumnya semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah maka akan menunjukkan semakin kecilnya tingkat keterikatan daerah terhadap pemerintah pusat. Namun kenyataannya pemerintah daerah masih bergantung terhadap dana bantuan dari pusat atau yang

sering disebut dana perimbangan. Berikut ini tabel pendapatan daerah di Sumatera Utara tahun 2016-2022.

Tabel 1. 1 Pendapatan Daerah di Sumatera Utara tahun 2016-2022.



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan tabel diatas, Pendapatan Asli Daerah adalah sumber dana terbesar kedua pendapatan daerah Sumatera Utara pada tahun 2016-2021 setelah dana perimbangan. Pada tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah membaik karena kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah mencapai 53,43% dan menjadi sumber pendapatan terbesar setelah dana perimbangan. PAD ialah salah satu sumber pendapatan yang harus dipacu pertumbuhannya secara berkesinambungan. Agar hal ini dapat dicapai, tentunya komponen-komponen yang berkaitan dengan itu harus ditindaklanjuti. Misalnya dengan memberikan pelayanan yang baik dan perbaikan-perbaikan fasilitas umum bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat turut merasakan manfaat pajak yang dibayarkan. Pajak Daerah ialah komponen penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara. Besarnya PAD ini akan sangat berguna dalam rencana peningkatan kemandirian pemerintah

daerah untuk tidak selalu tergantung kepada bantuan dari Pemerintah Pusat. Akan tetapi berdasarkan tabel pendapatan daerah diatas, pemerintah Sumatera Utara masih ketergantungan terhadap dana perimbangan untuk membiayai segala kegiatan pemerintahannya.

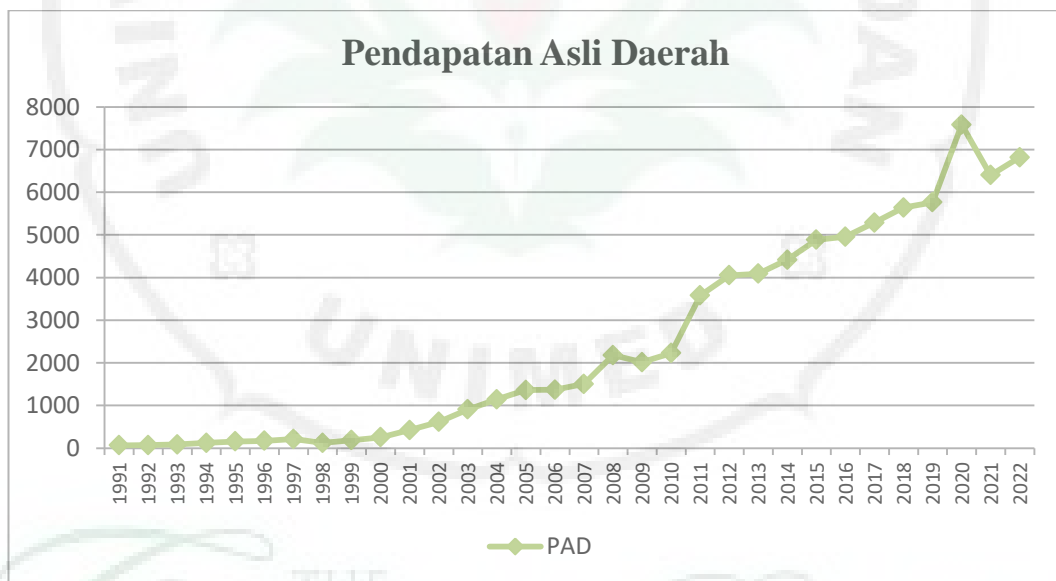
Menurut Hartoyo (2017), terdapat tujuh faktor yang menyebabkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada akhirnya mengakibatkan ketergantungan pada pemerintah pusat. Faktor-faktor tersebut antara lain: Pertama, kurangnya sensitivitas daerah dalam mengidentifikasi keunggulan budaya dan potensi asli daerah. Kedua, tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah. Ketiga, sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah yang lemah. Keempat, kekurangan dalam kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur. Kelima, kekhawatiran birokrasi terhadap kegagalan dalam melaksanakan program-programnya. Keenam, kurangnya optimisme terhadap hasil yang dapat dicapai. Ketujuh, sering kali terjadi peningkatan biaya program (mark up) sejak awal pada setiap anggaran pengeluaran. Namun, jika anggaran biaya program diawali dengan efisiensi yang maksimal sejak awal, maka tersedia sisa anggaran yang dapat digunakan untuk pelaksanaan program lainnya yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sumber daya alam Sumatera Utara sangat melimpah dan luar biasa, termasuk sumber daya alam hayati dan non-hayati. Potensi sumber daya alamnya mencakup kekayaan laut, darat, dan bumi, serta berbagai sumber daya alam lainnya di Sumatera Utara. Maka dari itu pemerintah Sumatera Utara perlu

bekerja keras untuk menggali potensi-potensi tersebut untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jika potensi tersebut dapat dioptimalkan dengan sebaik-baiknya, hal ini akan berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Akibatnya, pemerintah akan memiliki keleluasaan yang lebih luas untuk melakukan pembangunan daerah demi memenuhi kepentingan masyarakatnya. Berikut ini Grafik Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara mulai tahun 1991-2022.

Gambar 1. 1

Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara Tahun 1991-2022



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan grafik diatas Pendapatan Asli di Sumatera Utara pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2022 mengalami Fluktuasi. Pendapatan Asli Daerah terendah terdapat pada tahun 1991 sebesar 65,38 milyar sedangkan pendapatan asli terbesar terdapat pada tahun 2020 yang mencapai 7.583,84 milyar. Walaupun pada tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi akibat dampak pandemi covid-19 akan tetapi Pendapatan Asli Daerah di Sumatra Utara justru meningkat.

Peningkatan tersebut diakibatkan keberhasilan pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk melakukan pemulihan perekonomian akibat dampak dari pandemi covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah guna peningkatan wajib pajak dalam membayar pajak adalah kebijakan insentif pajak kepada pajak.

Pemberian insentif pajak ditujukan untuk meringankan masyarakat dalam membayar pajak karena situasi perekonomian yang tidak stabil sehingga insentif yang diberikan dapat menarik minat wajib pajak untuk segera membayarkan pajak tersebut. Selain itu pemerintah juga memiliki tujuan agar penerimaan pendapatan dari sektor pajak meningkat walaupun kebijakan insentif ini diberlakukan (Riyanto dan Andiani, 2021). Kebijakan insentif pajak ini berhasil menarik minat wajib pajak untuk membayar pajak di Sumatera Utara. Hal ini dapat dilihat dimana penerimaan pajak daerah di Sumatera Utara pada tahun 2020 meningkat sebesar 6.087,36 milyar atau meningkat 1.028,92 milyar yang sebelumnya penerimaan pajak daerah di tahun 2019 sebesar 5.058,44 milyar. Setelah itu pendapatan asli daerah pada tahun 2021 mengalami penurunan karena pemberian insentif pajak untuk tahun itu diberikan kepada sektor-sektor yang terdampak dalam oleh pandemi covid-19 dan pemulihan usahanya paling lambat dari sektor lain. Setelah itu pendapatan asli daerah pada tahun 2022 meningkat karena keadaan perekonomian pada tahun 2022 semakin baik.

Salah satu faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah adalah Jumlah penduduk. Apabila semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak pula yang membayar pajak daerah yang telah ditentukan oleh pemerintah

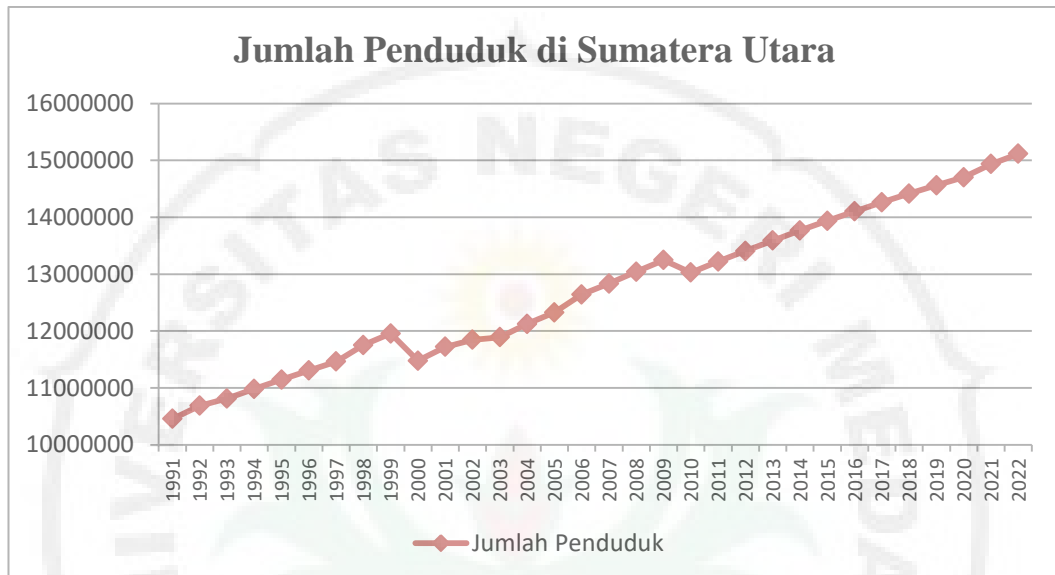
daerah. Oleh sebab itu, jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD karena dengan bertambahnya jumlah penduduk maka semakin besar jumlah pungutan yang telah ditentukan pemerintah. Hal ini sejalan dengan teori dari simanjuntak (dalam Halim, 2001) yang mengatakan bahwa besarnya PAD bisa dipengaruhi oleh jumlah penduduk, apabila jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang akan ditarik akan meningkat.

Adam Smith berpendapat bahwa dengan didukung bukti empiris bahwasanya pertumbuhan penduduk tinggi akan meningkatkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Apabila pertumbuhan penduduk tinggi yang diiringi perubahan teknologi akan mendorong tabungan (saving) dan penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi bukanlah suatu masalah melainkan pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mempercepat pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena apabila jumlah penduduk meningkat akan meningkatkan pendapatan masyarakat karena besarnya pendapatan dipengaruhi penduduk (Santoso dan Rahayu, 2005).

THE
Character Building
UNIVERSITY

Gambar 1. 2

Grafik Jumlah Penduduk di Sumatera Utara Tahun 1991-2022



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan grafik diatas, Jumlah penduduk di Sumatera Utara dari tahun 1991 sampai tahun 2022 mengalami tren meningkat. Pada tahun 1991 perkembangan jumlah penduduk di Sumatera Utara sebesar 10,45 juta jiwa dan mengalami peningkatan sampai tahun 1999 sebesar 11,95 juta jiwa. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2000 sebesar 11,47 juta jiwa. Pada tahun 2001 perkembangan jumlah penduduk mengalami peningkatan sebesar 11,72 juta jiwa sampai tahun 2009 sebesar 13,24 juta jiwa. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Sumatera Utara menurun sebesar 13,02 juta jiwa atau turun sebesar 219.723 jiwa. Hal ini disebabkan karena pemerintahan orde baru menetapkan kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan melaksanakan program keluarga berencana. Dengan diterapkannya hal tersebut laju pertumbuhan di Indonesia termasuk Sumatera Utara dan wilayah lainnya dapat diatasi (Hamid, 2018). Akan tetapi jumlah penduduk di Sumatera Utara pada tahun 2011 kembali mengalami

peningkatan sampai tahun 2022 sebesar 15.115.206 jiwa. Naiknya jumlah penduduk ini diakibatkan karena adanya hambatan dalam nilai sosial budaya masyarakat yang masih tradisional.

Secara teori Jumlah Penduduk dan Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan yang positif yang artinya apabila jumlah penduduk meningkat maka pendapatan asli daerah juga meningkat. Namun berdasarkan grafik diatas beberapa data menunjukkan jumlah penduduk memiliki hubungan yang negatif dengan pendapatan asli daerah. Hal tersebut ditunjukkan dengan data pada tahun 2009 jumlah penduduk meningkat sebesar 13.248.386 jiwa yang sebelumnya pada tahun 2008 sebesar 13.042.317 jiwa akan tetapi pendapatan asli daerah turun menjadi 2.016,07 milyar yang sebelumnya mencapai 2.181,3 milyar. selain itu, pada tahun 2010 jumlah penduduk turun menjadi 13.028.663 jiwa akan tetapi pendapatan asli daerah meningkat menjadi 2.226,5 milyar dan pada tahun 2021 pendapatan asli daerah turun menjadi 6.402,71 milyar akan tetapi jumlah penduduk justru meningkat menjadi 14.936.148 jiwa.

Penelitian yang mengkaji antara jumlah penduduk dan pendapatan asli daerah sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan Purba dan Manurung (2023) jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Pematang Siantar. Namun temuan berbeda ditemukan oleh Adriani dan Handayani (2017) dimana jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah adalah Pengeluaran Pemerintah. Semua biaya yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk membangun administrasi pembangunan dan infrastruktur dalam hal pembangunan suatu daerah. Pengeluaran pemerintah tersebut akan meningkatkan kegiatan ekonomi yang akan menambah aliran penerimaan pemerintah melalui peningkatan PAD (Rani, 2014).

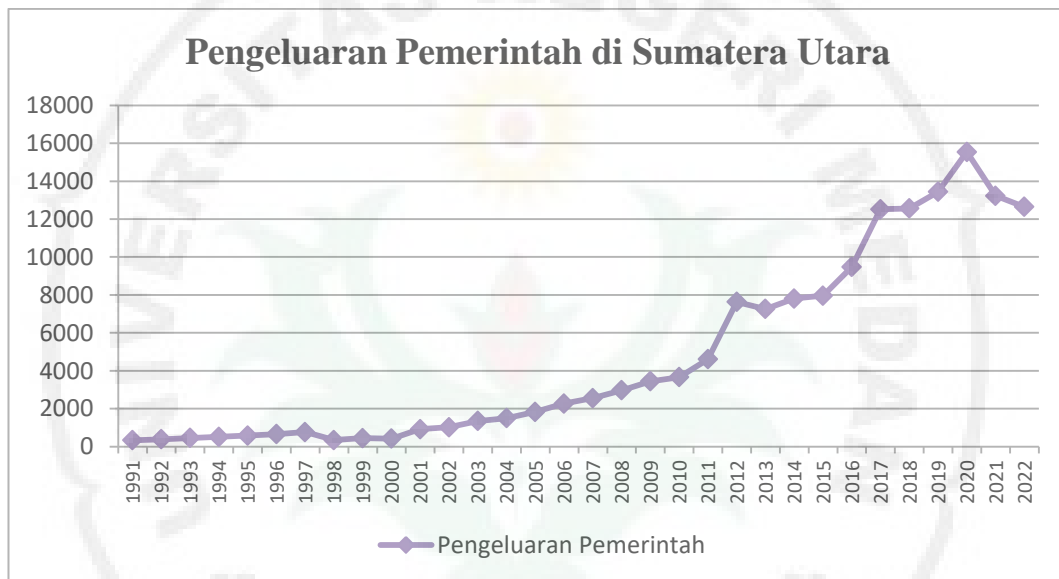
Pengeluaran Pemerintah (*government expenditure*) merupakan bagian dari kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2000) yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat *output*, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya berdampak positif terhadap PAD.

Menurut Santoso dan Rahayu (2005), peran pemerintah dalam pembangunan ialah sebagai katalisator dan fasilitator yang memerlukan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk alokasi anggaran untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sejumlah pengeluaran tersebut digunakan untuk administrasi pembangunan serta pembangunan infrastruktur yang penting. Pengeluaran-pengeluaran ini akan merangsang pengeluaran agregat dan meningkatkan tingkat kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, penerimaan pemerintah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga

akan meningkat. Berikut ini Grafik pengeluaran pemerintah Sumatera Utara tahun 1991-2022.

Gambar 1. 3

Grafik Pengeluaran Pemerintah di Sumatera Utara Tahun 1991-2022



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan grafik diatas, Pengeluaran Pemerintah di Sumatera Utara pada periode 1991-2022 mengalami fluktuasi. Pengeluaran pemerintah terendah terdapat pada tahun 1993 sebesar 336,9 milyar sedangkan pengeluaran pemerintah terbesar terdapat pada tahun 2020 yang mencapai 15.543,9 milyar. Peningkatan pengeluaran pemerintah pada tahun 2020 dikarenakan pada tahun tersebut terjadi pandemi covid-19 yang mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat untuk mengatasi penularan covid-19 dan pengeluaran pemerintah pada tahun tersebut diprioritaskan untuk kesehatan dan bantuan langsung tunai (BLT). Setelah itu pengeluaran pemerintah mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022, pada tahun 2022 pengeluaran pemerintah turun dikarenakan pemerintah memangkas

belanja operasi pada tahun 2022 sebesar 7.651, 49 milyar yang sebelumnya pada tahun 2021 mencapai 9.509 milyar. selain itu pemerintah meningkatkan belanja modal untuk memperbaiki jalan dan irigasi di Sumatera Utara pada tahun tersebut.

Secara teori Pengeluaran Pemerintah memiliki hubungan yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Artinya peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Akan tetapi berdasarkan grafik diatas ada data yang bertentangan dengan teori dimana pengeluaran pemerintah dan pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang negatif. Hal ini dapat ditunjukkan pada tahun 2009 pendapatan asli daerah meningkat akan tetapi pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 3.444,56 milyar. Selain itu pada tahun 2013 dan 2022 pengeluaran pemerintah mengalami penurunan namun PAD justru meningkat.

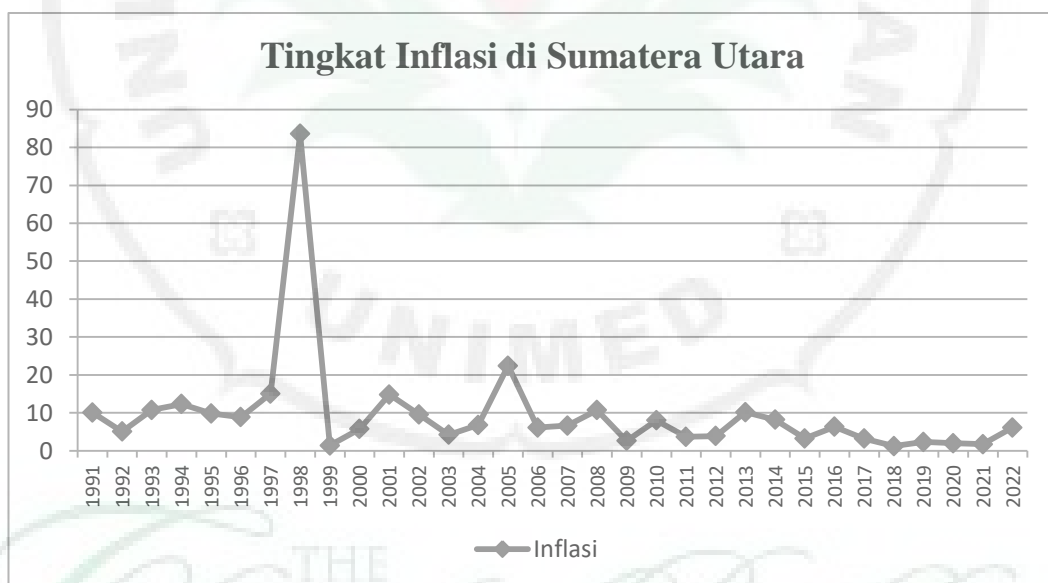
Peneliti sebelumnya telah meneliti hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pendapatan asli daerah. Asdar dan Naidah (2020) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah secara positif dan signifikan. Di sisi lain, Marfi (2014) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah secara negatif dan tidak signifikan.

Selain itu faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) adalah tingkat Inflasi. Mankiw (2006,87) mengatakan bahwa inflasi akan mempengaruhi pendapatan pemerintah daerah dan pengeluaran daerah. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk membiayai segala kegiatan pemerintahan

yaitu dengan mencetak uang. Apabila pemerintah mencetak uang berlebihan akan menyebabkan jumlah uang yang beredar di masyarakat tinggi. Peredaran uang yang tinggi akan menyebabkan terjadinya inflasi, hal ini disebabkan apabila jumlah uang yang beredar meningkat maka harga barang dan jasa akan mengalami peningkatan juga. Apabila permintaan akan barang dan jasa berlebihan akan menyebabkan inflasi yang memicu kondisi perekonomian yang buruk jika tidak dilakukan pengendalian.

Gambar 1. 4

Grafik Tingkat Inflasi di Sumatera Utara Tahun 1991-2022



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan grafik diatas tingkat Inflasi di Sumatera Utara mulai tahun 1991 sampai tahun 2022 mengalami fluktuasi (naik-turun). Inflasi terendah terdapat pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,23 % sedangkan inflasi tertinggi terdapat pada tahun 1998 yang mencapai 83,56 % sehingga pendapatan asli daerah di Sumatera Utara turun anjlok atau turun sebesar 42,1% dari tahun sebelumnya. Hal

tersebut disebabkan karena dampak dari krisis moneter yang terjadi dan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar serta faktor sosial politik yang tidak aman yang mengakibatkan harga barang dan jasa terus meningkat tajam pada tahun tersebut.

Inflasi ialah suatu kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus-menerus. Inflasi dapat menyebabkan efek buruk terhadap perekonomian salah satunya pendapatan riil (Sukirno,2016 : 334). Dengan kenaikan harga terus-menerus akan berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat dan sebaliknya jika inflasi rendah maka akan berdampak pada pendapatan masyarakat. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan PAD di Sumatera Utara.

Secara teori Inflasi dan Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan yang negatif yang artinya apabila inflasi meningkat maka pendapatan asli daerah akan mengalami penurunan. Namun berdasarkan grafik diatas beberapa data menunjukkan bahwa inflasi dan pendapatan asli daerah memiliki hubungan terbalik dengan teori atau berhubungan positif. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2001 dimana inflasi meningkat sebesar 14,79% dan pendapatan asli daerah juga meningkat menjadi 423,1 milyar yang sebelumnya pada tahun 2000 sebesar 255,1 milyar. Selain itu pada tahun 2005 dan 2008 inflasi mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2005 sebesar 22,41% dan pada tahun 2008 sebesar 10,72%. Peningkatan inflasi pada tahun tersebut juga diikuti peningkatan pendapatan asli daerah yaitu pada tahun 2005 sebesar 1.361,8 milyar dan pada tahun 2008 sebesar 2.181,3 milyar.

Peneliti yang mengkaji antara inflasi dan pendapatan asli daerah sudah pernah diteliti beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan Oktiani dan Muhariah (2021) menemukan bahwa tingkat inflasi berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Panjaitan (2022) menemukan bahwasanya inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu Soeroso (2022) juga menemukan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Utara diukur dengan memakai analisis *Error Corection Model* (ECM). Model tersebut digunakan ketika terdapat hubungan atau keseimbangan jangka panjang antara variabel dependen dan variabel independen, sementara dalam jangka pendek barangkali terjadi ketidakseimbangan. Kondisi ketidakseimbangan ini kerap terjadi dalam perilaku ekonomi, menandakan adanya ketidaksesuaian antara harapan dan realitas. Untuk mengatasi hal tersebut, ECM melibatkan penyesuaian untuk memperbaiki ketidakseimbangan tersebut. Metode ECM digunakan untuk mengatasi permasalahan data time series yang tidak stasioner dan regresi semu (Junaidi dan Juanda, 2012).

Berdasarkan uraian diatas terkait dengan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka penulis merasa tertarik untuk meneliti Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara dengan menjadikan

dalam hasil karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Utara”**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah pengumpulan persoalan yang memiliki keterkaitan dengan persoalan yang diteliti. Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, maka ditemukan masalah-masalah berikut ini

1. Pemerintah Sumatera Utara masih bergantung terhadap pemerintah pusat untuk membiayai segala kegiatan pemerintahannya.
2. Jumlah Penduduk di Sumatera Utara mengalami tren meningkat dan pada tahun 2000 dan 2010 jumlah penduduk mengalami penurunan.
3. Adanya hubungan terbalik antara pengeluaran pemerintah dengan pendapatan asli daerah. Secara teori pengeluaran pemerintah dan pendapatan asli daerah memiliki hubungan positif akan tetapi terdapat beberapa data menunjukkan pengeluaran pemerintah dan pendapatan asli daerah berhubungan negatif.
4. Tingkat inflasi di Sumatra Utara mengalami naik turun (fluktuasi) dan inflasi tertinggi terdapat pada tahun 1998 sebesar 83,56% dikarenakan pada tahun 1998 terjadi kritis moneter dan sosial politik yang tidak aman.

1.3 Batasan Masalah

Dengan memperhatikan identifikasi masalah diatas, supaya penelitian dilakukan lebih fokus maka peneliti membatasi variabel penelitian yang dipakai yaitu :

1. Penelitian ini menggunakan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Utara.
2. Variabel independen penelitian ini yaitu Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah dan Inflasi di Sumatera Utara.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang?
2. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang?
3. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang?
4. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis :

1. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Untuk menganalisis pengaruh Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang.
4. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk , Pengeluaran Pemerintah dan Inflasi secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang

1.6 Manfaat penelitian

Penuli berharap bahwa hasil penelitian ini bisa memberikan kegunaan bagi semua orang terutama bagi penulis. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - Guna mengembangkan wawasan penulis tentang Faktor-Faktor yang bisa mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara serta sebagai syarat wajib untuk menyelesaikan program sarjana ekonomi Universitas Negeri Medan.

2. Akademisi/Mahasiswa

- Bagi mahasiswa/akademisi kajian ini diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang luas serta bisa menjadi referensi bagi penelitian yang sejenis. Kajian penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dari kajian yang sudah ada maupun penelitian yang akan dilakukan.

3. Pemerintah

- Diharapkan hasil penelitian ini menjadi gambaran ataupun referensi bagi instansi pemerintah dalam menetapkan sebuah kebijakan tentang Pendapatan Asli daerah baik di Sumatera utara maupun di luar Sumatera utara.

4. Kampus UNIMED

- Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi ilmu terhadap mahasiswa dan menjadi masukan dan pertimbangan untuk mahasiswa Universitas Negeri Medan akan pentingnya peran pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mengurangi keterkaitan terhadap pemerintah pusat dan menciptakan daerah yang mandiri.
- Hasil penelitian ini diinginkan bermanfaat sebagai bahan anjuran dan nilai tambah di kalangan akademik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan dan secara khusus bagi Program Studi Ilmu Ekonomi dalam menganalisis pengaruh Pengeluaran

Pemerintah, Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

- Sebagai referensi civitas akademik Universitas Negeri Medan ataupun pihak-pihak lainnya yang ingin melakukan penelitian terhadap masalah yang sama pada yang akan datang.

